

Hak Atas Perempuan dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Surabaya, 28 Mei 2008

Tujuan dari Perkuliahan (28/5)

- Memahami bagaimana pengaturan hak-hak perempuan dalam hukum
- Memahami bagaimana hukum tersebut bisa melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan
- Studi kasus

Aturan Hukum Terkait

- UUD 1945
- CEDAW (1979) - UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak atas Sipil dan Politik
- UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Asasi dan Perempuan

- Apakah perempuan punya hak asasi manusia?
- Apa saja hak asasi yang dimilikinya?
- Apakah ada jenis hak asasi manusia yang dimiliki perempuan berbeda dengan laki-laki?

-
- Analisis dari sisi hak asasi manusia film berikut:
 - IMPOSSIBLE DREAM (durasi 8 menit).

Jangkauan tanggung jawab negara

- Di wilayah mana hak asasi perempuan harus dilindungi, dan apakah jangkauan tanggung jawab negara hingga level privat?
- Apakah dalam rumah tangga, perempuan (sebagai istri) punya hak asasi manusia?

Kekerasan terhadap Perempuan (1)

Dalam Rumah Tangga

- Dalam rumah tangga, apa yang dimaksud dengan KDRT dalam UU 23/2004?
- Apa saja larangan KEKERASAN dalam rumah tangga?
- Apa saja perlindungan yang harus didapatkan bagi korban KDRT?

Kekerasan terhadap Perempuan (2)

- Studi Kasus –
- Seri dokumen PBB.

Apakah Diskriminasi Gender itu?

- Article 1 CEDAW

"any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of hampering the enjoyment by women of their human rights. The rights enshrined in the Convention applies to all women, irrespective of their marital status. It prohibits discrimination in "political, economic, social, cultural, civil or any other" fields. More important, it covers discrimination in public and private ("or any other") actions.

The Convention prohibits intentional and unintentional discrimination.